

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI ARBITRASE
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



DISUSUN OLEH:

DEDE FEBRIANTO

Nim : 10727000187

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Semakin meningkatnya transaksi perdagangan dunia, khususnya di Indonesia, maka semakin kompleks pula permasalahan atau sengketa yang mungkin akan timbul. Umumnya, sengketa yang timbul diselesaikan melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian di pengadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit menjadi salah satu alasan masyarakat kemudian lebih tertarik untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kini semakin digemari oleh para pelaku usaha. Prinsip arbitrase sebagai penyelesaian sengketa secara cepat, murah dan efisien sesuai dengan prinsip dunia usaha. Apalagi Indonesia sendiri telah mempunyai dasar hukum sebagai landasan bagi pelaksanaan arbitrase, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selain keunggulan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang murah, cepat dan efisien, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan terutama dalam hal eksekusi putusnya. Walaupun di dalam undang-undang telah secara jelas mengatur tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, namun pada kenyataannya sangat sulit untuk pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini disebabkan apabila ada salah satu pihak yang dikalahkan dan merasa dirugikan akibat putusan arbitrase itu menolak untuk melaksanakan hasil putusan. Apalagi, arbitrase tidak mengenal upaya hukum lain dalam prosesnya, karena itu putusnya bersifat final dan mengikat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan arbitrase indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sudah dikenal di masyarakat Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda. Namun, ada kendala saat proses eksekusi putusan arbitrase, karena tidak ada upaya hukum yang dapat memaksa pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi mengenai arbitrase kepada masyarakat, selain itu perlu penegakan hukum oleh pemerintah terhadap proses pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding*. Hal ini diharapkan akan menimbulkan kepastian hukum yang tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
---------------	---

KATA PENGANTAR.....	ii
---------------------	----

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Analisis Data	14
4. Teknik Penulisan Data	14
G. Sistematika Penelitian	14

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Arbitrase	16
B. Syarat Perjanjian Arbitrase.....	17
C. Unsur-Unsur, Ruang Lingkup dan Asas-asas Arbitrase.....	19
D. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Arbitrase	20
1. Prosedur sebelum dengar Pendapat.....	20
2. Prosedur Pada waktu dengar Pendapat.....	21
3. Pelaksanaan Putusan	22

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	23
B. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa.....	26
C. Sejarah Arbitrase	27
D. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	37

BAB IV : EKSISTENSI ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA.

A. Eksistensi Arbitrase sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Indonesia	43
1. Landasan Titik tolak Arbitrase Pasal 377 HIR.....	44
2. Landasan Umum Arbitrase Pasal 615-651 RV	45
3. Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999	46
B. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase	53
1. Putusan Arbitrase (<i>Reglement of de Rechtsvordering</i>)	53
2. Sifat Putusan Arbitrase	54
3. Eksekusi Arbitrase.....	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, Indonesia akan menghadapi pengaruh perdagangan internasional yang besar. Pengaruh ini ditandai dengan akan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi bisnis antara para pengusaha dalam dan luar negeri. Peningkatan kompleksitas tersebut sedikit banyak akan berakibat timbulnya konflik atau sengketa. Hal tersebut perlu diikuti dengan pengembangan sistem untuk menangani nilai-nilai dari perbedaan pendapat. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan munculnya sengketa atau konflik, menyelesaikan secara cepat, tepat, dan memuaskan para pihak yang bersengketa, maka untuk itu diperlukan hukum sebagai alat kontrol masyarakat.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi menjalankan kepentingan-kepentingan perseorangan, kemudian menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan itu dan dinamakan 'Hukum Perdata' (*privat recht*). Hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan¹.

Setiap kegiatan dunia usaha, yang merupakan bagian dari hukum perdata, dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Baik itu sengketa dalam hubungan kerja sama, maupun sengketa antara

¹ Soeharyo Siomin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). h. 3

produsen dan konsumen. Ada 2 model penyelesaian sengketa dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu² :

1. Lembaga litigasi (formal / resmi)
2. Lembaga non litigasi (informal)

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrave proceedings*). Litigasi memiliki banyak kekurangan. Dimana litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, baik persoalan materi (substansi) maupun prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.³

Pihak yang berperkara sering kali dapat membuat litigasi berjalan semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi lebih mahal. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah memaksa pihak yang tidak memiliki sumber daya yang sama untuk menyerah dan menyelesaikan masalah menurut syarat-syarat yang menguntungkan pihak lain .⁴

Litigasi dianggap sebagai upaya yang tidak efisien oleh para pelaku dunia usaha, karena memakan waktu dan biaya yang besar. Dimulai dari memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau pengadilan Niaga, banding pada tingkat Pengadilan Tinggi, lalu Kasasi ke Mahkamah Agung, dan terakhir peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kesemua proses hukum tersebut memakan waktu

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) . h. 198

³ Suyud Mergono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000). h. 24

⁴ *Ibid.*

yang lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun untuk mencapai putusan yang *inkracht*. Belum lagi biaya yang dibutuhkan sangat besar selama proses tersebut berlangsung, mulai dari biaya kuasa hukum (advokat), biaya berperkara di pengadilan, dan biaya operasional lainnya.

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar adanya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak yang merasa dikalahkan. Faktor lain yang mengakibatkan pengadilan yang bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon kepentingan rakyat biasa (*ordinary citizen*) adalah karena kemampuan hakim yang bersifat generalis, hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara.⁵

Penyelesaian melalui lembaga non litigasi meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶ Sedangkan menurut Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari arbitrase, yaitu: Proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang mengadakan perjanjian

⁵ Yahya Harahap, *Alternative Dispute Resolution*, (Jakarta : BPHN, 1996). h. 16

⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 138 Tahun 1999

untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final mengikat⁷.

Lembaga non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Melalui lembaga non litigasi ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan bebas, dan persaingan bebas dalam rangka perdagangan global.

Penyelesaian sengketa melalui salah satu dari dua lembaga diatas menunjukkan sebuah situasi bahwa kedua belah pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Perbedaan itu tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyimpan saja dalam hati mereka perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa, bilamana pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, maupun melalui Badan Peradilan Umum.

Arbitrase sendiri telah termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa No. 30 Tahun 1999 : Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberi putusan mengenai suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa dalam pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan

⁷ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* , (Bandung : Bina Cipta, 1979)

bahwa : “Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidangperdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa”.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang digunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersama dengan dipakainya Op De Rechrverordering (RV) dan Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitewengesten (RBg), karena semula arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglement Op De Rechtverdering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar peradilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.⁸

Peranan badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis dibidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin penting. Banyak kontrak nasional dan internasional menyelipkan klausula arbitrase bagi kalangan bisnis. Cara penyelesaian sengketa melalui badan ini memberikan keuntungan tersendiri, daripada melalui badan peradilan nasional.⁹

⁸ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan UU No. 30 Tahun 1999*, diakses dari situs www.uika-bogor.ac.id.htm, 11 februari 2011

⁹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). h. 1

Mekanisme alternatif penyelesaian dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan diakui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua model penyelesaian sengketa ini, baik melalui lembaga formal ataupun lembaga informal (arbitrase) mempunyai perbedaan yang sangat prinsip sebagai berikut :¹⁰

1. Hakim di Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, sedangkan pada arbitrase wasit diangkat dan diberikan oleh KADIN (Ikatan Kamar Dagang Indonesia) atau pengurus lembaga yang memberikan kewenangannya kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional) ;
2. Pengadilan Negeri punya birokrasi yang bertingkat dan berlapis-lapis, sedangkan arbitrase bersifat tunggal ;
3. Pengadilan Negeri tidak saja menangani perkara perdata, tapi juga perkara lainnya, sedangkan arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya khusus menangani perkara dibidang perdagangan atau bisnis ;
4. Pengadilan negeri dalam mengeluarkan keputusan memakan waktu, biaya mahal dan terikat birokrasi, sedangkan arbitrase putusan sudah ditentukan harinya dan lamanya bahkan boleh disepakati oleh kedua belah pihak ;
5. Pengadilan Negeri selalu sidang itu bersifat terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali bersifat khusus, sedangkan arbitrase sidang dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali dalam membacakan putusannya ;

¹⁰ Richard Burton Simatupang., *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta : Rienka Cipta, 2007). h. 45

6. Pengadilan Negeri punya kewenangan memeriksa dan mengadili hanya sebatas teritorial atau wilayah hukumnya, sedangkan arbitrase tidak hanya dapat menyelesaikan perkara bersifat lokal, tapi juga bersifat internasional ;
7. Pengadilan Negeri putusan yang bersifat *inkracht* (kekuatan hukum tetap) dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi oleh si Pemohon, sedangkan arbitrase belum bisa melaksanakan putusan itu sebelum didaftarkan atau disahkan dari dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Eksistensi arbitrase memang diakui di Negara kita. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

“Bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Namun, penjelasan pasal itu juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.¹¹

Perkembangan pelaksanaan penyelesaian melalui badan peradilan ternyata tidak mampu dalam memenuhi harapan masyarakat dikarenakan dalam peradilan tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu proses cepat, efektif, efisien, dan tidak dapat menyesuaikan dengan lajunya perekonomian dan perdagangan. Hal ini menimbulkan suatu pemikiran keragu-raguan terhadap keefektifan peradilan Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, seperti sengketa

¹¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992). h. 3

perniagaan. Tetapi untuk beberapa Negara lain, terkadang proses pengadilannya dapat lebih cepat dari proses arbitrase itu sendiri.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.¹² Apabila telah ada suatu perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Negeri yang karena jabatannya diminta untuk mengadili, harus menyatakan diri tidak berwenang. Jika dalam pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa kontrak antara para pihak mengandung klausa arbitrase.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa masih saja ada sengketa yang sebelumnya dalam perjanjian telah terdapat klausa arbitrase dan telah pula diputuskan sengketanya oleh BANI, dibawa penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini ternyata Pengadilan Negeri menerima perkara yang diajukan tersebut.

Salah satu contohnya adalah sengketa antara perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) dengan PT Pura Barutama pada tahun 2001. Sengketa berawal dari Perum Peruri menolak sebanyak 31.280 rim pasokan kertas uang rupiah pecahan Rp 5000,00 dan 44.478 rim kertas uang pecahan Rp 1000,00 dari PT Pura Barutama karena tidak memenuhi standar perjanjian, sehingga tidak layak dicetak menjadi uang. Penyelesaian sengketa ini kemudian dibawa ke BANI, karena dalam perjanjiannya telah tercantum klausula arbitrase. Di BANI sengketa ini didaftarkan dengan nomor registrasi perkara No. 147/IV/ARB/BANI/2001. Hasil keputusan BANI menyatakan PT Pura Barutama telah wanprestasi dan meminta untuk memusnahkan kertas uang yang telah

¹² Indonesia, *op.cit.*, ps 3.

diproduksi. Namun, PT Pura Barutama tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut. Sebaliknya, PT Pura Barutama malah mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Kudus.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus ternyata membatalkan putusan arbitrase tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Perum Peruri yang tidak puas lalu menyatakan banding ke Mahkamah Agung. Putusan tanggal 26 Februari 2003, permohonan Perum Peruri dikabulkan dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kudus batal demi hukum. Selain itu Mahkamah Agung memerintahkan kembali pemeriksaan kembali ulang perkara tersebut karena Perum Peruri sebagai lawan sengketa PT Puri Barutama belum diberi kesempatan menanggapi permohonan pembatalan putusan arbitrase.¹³

Begitu banyaknya sengketa bisnis di Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase, maka berarti telah banyak pula keputusan arbitrase yang dilahirkan. Keputusan arbitrase yang pada dasarnya bersifat *win-win solution* ini adakalanya menimbulkan ketidakpuasan terhadap salah satu pihak. Walaupun sebelumnya para pihak telah menyepakati untuk menggunakan jalur arbitrase dan menyanggupi untuk menerima dan menjalankan segala keputusan hasil arbitrase tersebut. Ketidakpuasan membuat pihak yang merasa dirugikan enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya kekuatan memaksa dari suatu putusan arbitrase membuat pihak-pihak tertentu lalai untuk melaksanakan putusan arbitrase itu. Pihak yang merasa dirugikan tidak

¹³ <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/06/27/brk,20030627-19,id.html> diakses tanggal 7 Januari 2011 pukul 16.33 WIB, judul artikel *Peruri Tolak Pasokan Kertas Uang Pura Barutama*.

mempunyai upaya hukum lebih lanjut untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, kecuali apabila ternyata keputusan itu bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa melalui suatu penelitian secara normatif dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis yang disampaikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana eksistensi arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan putusan Arbitrase Nasional ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kekuatan putusan Arbitrase Nasional.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum Bisnis pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dari masyarakat umum dalam lapangan bisnis, yaitu dengan memberikan informasi peranan keberadaan lembaga arbitrase. Setidak-tidaknya memberikan konstribusi pemikiran maupun informasi tentang penyelesaian sengketa dan peranan lembaga perwasitan terhadap penyelesaian sengketa.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa mengenai arbitrase.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁴

Didalam penelitian ini akan memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Di dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi.¹⁵

Taraf sinkronisasi telaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan membuat inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasinya yang rendah, sedang, atau tinggi.¹⁶

2. Sumber Data

Penelitian hukum mengenal adanya data untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan apa yang seharusnya diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, h. 13.

¹⁵ *Ibid*, h. 17.

¹⁶ *Ibid*, h. 80.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 138 Tahun 1999.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku serta literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti..
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Metode dan alat pengumpulan bahan dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.

3. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan dan setelah tersusun rapi kerangka yang jelas diberi penganalisaan dengan metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latarbelakang situasi dan budaya.

4. Teknik Penulisan Data

Penulisan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu :

¹⁷ *Ibid*, h. 52

- a) Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat umum menjadi data bersifat khusus.
- b) Metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menjadi data bersifat umum.
- c) Metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data yang diperoleh apa adanya yang selanjutnya dianalisa secara sistematis agar mendapatkan hasil yang seobjektif mungkin.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan jasa cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Pengertian arbitrase, syarat perjanjian arbitrase, prosedur pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Arbitrase, unsur-unsur arbitrase, ruang lingkup arbitrase, asas arbitrase.

BAB III : Tinjauan Teoritis,yaitu berisi ADR atau Alternatif penyelesaian sengketa menguraikan pengertian, Teori tentang Penyelesaian Sengketa, Sejarah Arbitrase, keuntungan dan kelemahan arbitrase..

BAB IV : Pembahasan, yaitu berisi tentang Eksistensi Arbitrase sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini terutama bagi yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM ARBITRASE

A. Pengertian Arbitrase

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memang telah memberikan pengertian arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun, pengertian yang diberikan tersebut belum menggambarkan pengertian arbitrase secara menyeluruh. Untuk memahami pengertian arbitrase secara menyeluruh diperlukan penjelasan yang diberikan oleh para ahli. Selain itu perlu dijelaskan mengenai syarat-syarat suatu sengketa agar dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase serta bagaimana prosedur pelaksanaan arbitrase. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Pengertian Arbitrase Menurut Ahli Hukum

Untuk memahami pengertian arbitrase dua orang ahli telah memberikan pengertian mengenai arbitrase yaitu:

Menurut Priyatna Abdurrasyid:

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – aps yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya – ketidaksefahamannya – ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara

hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat.¹

Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari arbitrase, yaitu: Proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final mengikat.²

B. Syarat Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan pengertian arbitrase, perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa.³ Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.⁴

Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.⁵ Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah cara dan lembaga apa yang berwenang menyelesaikan

¹ Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", (2003) 1:1, *PPH Newsleter Kajian Hukum Ekinomi dan Bisnis* No. 52, h. 56-57

² Subekti, *op. cit.*, h.5.

³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 butir 3.

⁴ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 42.

⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 3.

perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji. Perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat yaitu persetujuan mengenai perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.⁶

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausul arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok.

Timbul suatu konsekuensi dari sifat perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian aksesori. Dengan sifat aksesorinya, suatu perjanjian arbitrase tidak akan hapus karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Selain itu, perjanjian arbitrase juga tidak akan hapus oleh keadaan meninggalnya para pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, dan pengalihan perjanjian kepada pihak ketiga atas persetujuan pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase.⁷

C. Unsur-unsur, Ruang Lingkup dan Asas-Asas Arbitrase

Unsur-unsur Arbitrase

⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 9 ayat (1).

⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 10.

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada pihak ketiga yang bertindak sebagai wasit melalui proses diluar peradilan.
2. Ruang lingkup sengketa adalah yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya bidang perdagangan dan keuangan.
3. Putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa.

Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase berdasarkan ketentuan pasal 5 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa baik bersifat nasional maupun internasional.

Asas-asas Arbitrase

1. Asas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai atau sepaham untuk menunjuk seorang arbiter.
2. Asas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
3. Asas limitative adalah adanya pembatasan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan dibidangperdagangan atau bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak bersengketa.

4. Asas final dan binding adalah putusan arbitrase yang bersifat akhir dan tidak dapat lagi diajukan upaya lain, seperti banding dan kasasi.⁸

D. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Prosedur arbitrase perlu dipahami untuk melihat apakah prosedur arbitrase konvensional seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diterapkan menjadi mekanisme *online*. Secara garis besar, prosedur arbitrase dapat dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut.

1. Prosedur sebelum dengar pendapat.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, diawali dengan prosedur sebelum dengar pendapat yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan kepada arbiter tentang penunjukannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan arbitrase adalah pemberitahuan secara tertulis kepada seorang ahli bahwa ia telah dipilih sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa.
- b. Persiapan arbiter. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh arbiter adalah penunjukannya sudah dilakukan berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan praktek, biasanya arbiter mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pihak sebelum mengadakan dengar pendapat secara resmi.

⁸ H. Sudarto dan Zacni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada). h.32

- d. Prosedur pelaksanaan tugas arbiter. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter berwenang untuk memerintahkan dan melakukan interogasi dalam proses dengar pendapat. Dalam proses tersebut, arbiter dapat bersikap aktif, yaitu arbiter bertindak mencari data. Namun, arbiter juga dapat bersikap pasif, yaitu para pihak lah yang menyampaikan data-data sedangkan arbiter cukup mendengarkan saja.
- e. Menentukan waktu dan dengar pendapat. Jika ada salah satu pihak yang tidak datang pada saat dengar pendapat, maka arbiter tetap dapat melakukan dengar pendapat tersebut.
- f. Komunikasi perorangan para pihak. Apabila salah satu pihak dalam proses arbitrase menghubungi arbiter tanpa sepengetahuan pihak lain, arbiter wajib menolaknya.

2. Prosedur pada waktu dengar pendapat.

Arbiter memiliki kedudukan sebagai seorang hakim berdasarkan adanya kesepakatan penunjukan para pihak yang bersengketa. Penunjukan oleh para pihak ini memberikan wewenang kepada arbiter untuk dapat memutus berdasarkan fakta yang diberikan kepadanya. Pada saat arbitrase berlangsung pihak ketiga atau pihak lain (umum) tidak diperbolehkan hadir dalam proses tersebut. Hal ini merupakan cerminan dari sifat arbitrase yang menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

3. Pelaksanaan putusan.

Dalam melaksanakan putusan arbitrase ada tata cara pelaksanaan yang harus ditempuh. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tata cara pelaksanaan pokok-pokok di dalam putusan tergantung pada telah didaftarkannya di pengadilan atau belum.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terlihat arbitrase merupakan bagian yang sama dengan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini juga terlihat dalam konsiderans undang-undang tersebut yang menyatakan “...penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.”¹

Untuk lebih memahami permasalahan tersebut perlu diingat penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa adalah hasil terjemahan kata *Alternatif Dispute Resolution*(ADR). Dalam pengertian aslinya, ADR sering diartikan sebagai *alternative to adjudication* dan *alternative litigation*.² Apabila mengartikan ADR sebagai *alternative to adjudication*, konsekuensinya adalah arbitrase bukan merupakan bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya final dan mengikat. Pihak ketiga ini sering dipersamakan dengan hakim atau biasa disebut dengan istilah “hakim swasta”. Dengan demikian yang dapat dikatakan sebagai

¹Indonesia, *op. cit.*, konsiderans huruf a.

² Suyud Margono, *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 36.

ADR menurut pengertian ini hanyalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir, hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan (damai) para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator atau lebih.

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan melakukan komunikasi kepada para pihak sehingga mendapatkan solusi pada permasalahan tersebut.³

Jika ADR diartikan sebagai *alternative to litigation* cakupan pengertiannya akan menjadi lebih luas. Dengan pengertian ini, selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, arbitrase juga merupakan ADR. Arbitrase dapat dikatakan sebagai ADR dalam pengertian ini, karena arbitrase sendiri lahir akibat adanya masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tetapi tidak ingin melalui proses litigasi, sehingga memilih menyelesaikannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, segala penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi dapat disebut sebagai ADR. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat dari Priyatna Abdurrasyid yang mengatakan:

³ *Ibid*, h. 15

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang dipakai dalam APS.⁴

Melihat konstruksi kalimat yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, terlihat bahwa undang-undang membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan tidak melalui proses litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli berdasarkan metode penyelesaiannya saja karena arbitrase mempunyai ketentuan, cara, dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya.⁵

Permasalahan selanjutnya adalah penggunaan padanan kata ADR menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan dan beberapa literatur terkait pembahasan lingkungan hidup dikatakan padanan yang tepat untuk ADR adalah Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS).⁶

⁴ Aburrasyid. *op. cit.*, h. 17-18.

⁵ Margono, *op. cit.*, h. 108.

⁶ Salah satu literatur tersebut ditulis oleh Mas Achmad Santosa yang berjudul *Pelembagaan ADR di Indonesia*. Makalah pada Kuliah Umum ADR, (Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 1999) h. 1-2. Pendapat ini dikutip dari buku Margono, *op. cit.*, h. 37. Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggunakan istilah Pilihan Penyelesaian Sengketa sebagai padanan kata *Alternative Dispute Resolution*. Pilihan Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan. Fokus penyelesaian sengketa dalam matakuliah ini pada proses negosiasi dan mediasi, tidak pada arbitrase.

Dalam penulisan ini istilah yang digunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan pertimbangan, kata *Alternative* menurut kamus Inggris – Indonesia diartikan sebagai *pilihan antara dua hal, alternatif, jalan lain*, dengan demikian kata *alternative* selain bisa diartikan sebagai pilihan antara dua hal dapat juga diterjemahkan langsung melalui penyerapan bahasa menjadi alternatif.

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata alternatif diartikan sebagai *pilihan di antara dua kemungkinan*, sehingga penggunaan kata “alternatif” sebagai padanan kata *alternative*.⁷ Jadi dalam kata alternatif sudah terkandung kata pilihan, untuk itu digunakan istilah alternatif penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan kaedah bahasa Indonesia.

B. Teori tentang Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain :⁸

1. Melalui perjanjian ;
2. Melalui konsiliasi ;
3. Melalui arbitrase ;
4. Melalui pengadilan.

Beberapa cara tersebut diatas akan efektif pelaksanaannya apabila memenuhi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, yaitu :⁹

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 24.

⁸ Suyud Margono, *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000). h. 15

⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005). h. 196

- 1) Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus);
- 2) Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa;
- 3) Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan digunakan apabila sengketa diselesaikan melalui arbitrase;
- 4) Prinsip itikad baik (*Good Faith*);
- 5) Prinsip *exhaustion of local remedies* (khusus untuk sengketa internasional).
Maksudnya sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

C. Sejarah Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit¹⁰. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.¹¹

Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana satu pihak atau lebih

¹⁰ R. Subekti, *kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 1980). h. 1.

¹¹ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung : Alumni, 1976). h. 5

menyerahkan sengketa, ketidaksepahamannya, ketiaktepatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menetapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase pasal 1 ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Peran arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang yang berskala internasional, dimulai pada pengujung abad ke-18, yang ditandai dengan lahirnya *Jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karakternya menjadi arbitrase internasional yang didasarkan pada tata cara yang diatas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaian cenderung dipengaruhi kepentingan politik.¹²

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importer serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu :¹³

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997). h. 226.

¹³ Gunawwan Widjaja dan Akhmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000). h. 13.

1. Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia;
2. Badan arbitrase tentang kebakaran, dan;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, diantaranya :¹⁴

- 1) *Court of Arbitration of The Internasional Chamber of Commerce (ICC)* yang didirikan sesudah Perang Dunia I pada tahun 1919, berkedudukan di Paris.
- 2) *Convention on The Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Award* atau *The 1958 New York Convention* (konvensi New York) yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958.
- 3) *The Internasional Center of Settlement of Investment Dispute (ICSID)*. Yang didirikan Bank Dunia pada tanggal 16 Februari 1968.
- 4) *Arbitration United Nations on International Trade Law*, yang didirikan berdasarkan Resolusi Nomor 31/98 Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976.

Sedangkan di Indonesia, arbitrase sebenarnya juga mempunyai sejarah yang panjang, sebab arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum secara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya Rv yang diatur dalam pasal 615 sampai 651. Selanjutnya sejarah perkembangan arbitrase ditandai dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional (BANI).

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta : Grasindo, 2002). h. 6

Arbitrase diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, sebagaimana diubah pada saat ini dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan, serta pedoman bagi lingkungan peradilan yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian hal ini diatur pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana pada dasarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah mendapat izin atau perintah untuk melaksanakan eksekusi dari Pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, yaitu :¹⁵

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator), baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ketiga, misalnya pengadilan internasional). Pasal 13 UU No. 30 Tahun 1999.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan. Pasal 31 ayat (1), (2), (3) UU No. 30 Tahun 1999.
3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat. Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). h. 41

4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999.
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, yaitu :¹⁶

1. Aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan *public policy*. Putusan Hoge Raad Belanda, 6 Januari 1925 misalnya. Disini ditegaskan, sungguhpun ada klausa arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausa arbitrase bukanlah *openbar orde*. Aliran yang sangat *reasonable* dan *flexible* ini sayangnya tidak diikuti dalam praktik yurisprudensi Indonesia.
2. Aliran yang menekankan asas *pacta sunt servanda* pada kekuatan klausa atau perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausa atau perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam atau praduga telah di '*waive*' tidak berlaku dan perjanjian atau klausul arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi absolut. Aliran yang terkesan kaku ini banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan.

Disamping dua aliran tersebut, ada suatu perkembangan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, seperti yang diputus oleh

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sngketa Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000). h. 121.

Mahkamah Agung No. 1851 K/Pdt/1984. Keputusan yang kontroversial ini masih belum jelas apakah akan diikuti oleh keputusan-keputusan yang lain nantinya. Pada prinsipnya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausa arbitrase dalam perjanjian para pihak, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya. Alasannya, karena para pihak tidak serius (dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase).¹⁷

Adanya klausa arbitrase yang secara tegas dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian itu. Hal ini dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adanya suatu perjanjian tertulis arbitrase telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang di trtapka dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menyatakan, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dari pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa sengketa arbitrase itu lazimnya berawal dari wapresasi suatu

¹⁷ *Ibid*, h. 122.

perjanjian hubungan suatu kerja sama. Sengketa itu juga haruslah yang memungkinkan untuk diadakannya perdamaian. Dengan kata lain, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Perjanjian arbitrase seringkali menyertai perjanjian pokok, baik nasional maupun internasional. Segi positif dengan adanya klausa arbitrase yaitu bahwa para pihak dapat memilih proses penyelesaian sengketa mereka kelak dikemudian hari. Di dalam hal ini, mereka dapat pula merancang klausa tersebut sedemikian rupa sehingga ketentuan-ketentuan maupun pernyataan arbitrase yang tercantum dapat memenuhi keinginan mereka.

Pencantuman klausa arbitrase tersebut harus sangat hati-hati agar salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama puas dan sama-sama tidak merasa dirugikan.¹⁸ Perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau suatu perjanjian sendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian secara tertulis.

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbentenis*). Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan pasal 1253-127 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak dipersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi

¹⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). h. 20.

hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar pihak yang berjanji.

Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausa arbitrase merupakan tambahan pada perjanjian pokok. Itu sebabnya disebut dengan perjanjian asesoir. Keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.¹⁹

Perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara sepihak. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Tidak ada ikatan arbitrase yang lahir dari ketentuan undang-undang. Semuanya harus lahir dari perjanjian dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.²⁰

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, seperti yang tercantum pada pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999, *Para Pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*. Bentuk klausa arbitrase tersebut dibedakan atas dua bentuk, yaitu :²¹

1. *Pactun de compromittendo* adalah bentuk klausa arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata;

¹⁹ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1991). h. 96.

²⁰ *Ibid*, h. 98.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). h. 23.

2. *Acta compromise* adalah bentuk klausa arbitrase yang dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok.

Klausa arbitrase yang dibuat harus memuat pernyataan apakah arbitrase itu akan dilakukan secara lembaga (*institutional*) atau ad hoc (*volunteer*).

1. Arbitrase lembaga (*institutional*) adalah arbitrase yang terkoordinasikan oleh suatu lembaga.
2. Arbitrase ad hoc (*volunteer*) adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc ini dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutuskan sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini.

Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga arbitrase, diantaranya :

- 1) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) didirikan oleh pemerintah Indonesia, berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran (maritim), lingkungan hidup, pengideraan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan pperundang-undangan dan kebiasaan internasional.²²
- 2) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara

²² http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html diakses tanggal 12 Maret 2011 pukul 14.44 WIB

pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.²³

- 3) BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) didirikan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta asosiasi-asosiasi dilingkungan pasar modal, untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.²⁴

Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan, putusan arbitrase itu bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan putusannya harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk eksekusinya. Jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase itu, maka putusannya tetap harus dilaksanakan dengan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

A. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Membicarakan kelebihan dan kekurangan arbitrase tidak terlepas dari sifat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang proses proseduralnya bersifat adjudikasi hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *“Arbitration is the most formalized alternative to the court adjudication of*

²³<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/31/mengurangi-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional-basyarnas/> diakses tanggal 12 Maret 2011 pukul 15.06 WIB

²⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia diakses tanggal 12 Maret 2011 pukul 15.21 WIB

disputes.” Akan dijelaskan mengenai kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi biasa sebagai berikut.

1. Konfidensial.

Artinya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase akan dijaga, sehingga dampak negatif yang timbul dari terlibatnya para pihak dalam suatu perselisihan tidak menjatuhkan kredibilitas para pihak. Hal ini terkait dengan nama baik para pihak yang saat ini merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dilindungi.

Tercemarnya nama baik suatu pihak dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak tersebut. Nama baik suatu pihak biasanya akan tercemar apabila pihak tersebut mengalami suatu perselisihan yang diketahui oleh publik. Dalam proses litigasi dikenal adanya asas terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pihak yang mengalami sengketa dan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi lalu proses persidangannya diekspose kepada publik. Dengan sendirinya nilai kepercayaan publik kepadanya akan berkurang

Melalui arbitrase, konfidensial para pihak tetap terjaga. Berbeda dengan pengadilan umum, arbiter tidak diwajibkan untuk menyampaikan putusannya secara terbuka. Tidak hanya dalam penyampaian putusan, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa: “Semua pemeriksaan

sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”²⁵ Dengan demikian maka nilai kerahasiaan para pihak akan terjaga.

2. Biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi dan penyelesaian sengketanya lebih cepat.

Pendapat mengenai biaya ini masih diperdebatkan, tidak selamanya biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi. Sebagai contoh apabila terjadi sengketa antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Vietnam lalu mereka sepakat menunjuk arbiter yang berada di New York untuk menyelesaikan sengketanya di Singapore. Maka perlu dihitung berapa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran perkara, biaya akomodasi arbiter, biaya akomodasi para pihak, honorarium untuk arbiter, dan biaya saksi ahli seandainya digunakan. Tentu para pihak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk arbitrase tersebut.

Di sisi lain, bagi seorang pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum dalam sengketa yang menyangkut usahanya, biaya tersebut tidak seberapa dibandingkan ia harus berlama-lama menyelesaikan perkara di pengadilan karena harus menunggu urutan perkaranya disidangkan dan ia tidak bisa melanjutkan usaha. Bagi mereka semakin cepat masalah sengketanya selesai dan memperoleh kekuatan hukum, semakin cepat pula untuk kembali berusaha mendapatkan keuntungan, sehingga secara umum biaya akan lebih murah.

Penyelesaian sengketa dalam arbitrase lebih cepat dari proses litigasi karena dalam arbitrase para pihak tidak usah menunggu perkaranya disidangkan. Para

²⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 27.

pihak bisa langsung memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, sehingga tidak dibutuhkan waktu tunggu sebagaimana pada proses litigasi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga sangat mungkin dalam satu minggu dilakukan beberapa kali proses pemeriksaan sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi, Majelis Hakim tidak hanya memeriksa satu perkara, sehingga dalam satu minggu perkara kemungkinan besar hanya diperiksa satu kali.²⁶ Dengan kata lain, keterlambatan-keterlambatan yang bersifat prosedural dan administratif dapat dihindari.

3. Para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan.²⁷ Dalam proses litigasi, para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memutuskan sengketa melainkan sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapannya.

Kelemahan dari penetapan tersebut adalah kemampuan Hakim yang terbatas pada pengetahuan hukum sementara pengetahuan lain hanya dikuasainya secara umum. Dengan arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memang menguasai bidang atau pengetahuan yang sedang dipersengketakan, sehingga putusannya lebih komprehensif dan profesional.

²⁶ Selain faktor waktu yang singkat yang menyebabkan biaya arbitrase dapat lebih murah, faktor terpenting terletak kepada para pihak. Apakah para pihak mau menjalankan putusan arbitrase secara suka-rela atau tidak. Apabila putusan arbiter dijalankan secara suka rela maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah. Untuk selengkapnya baca Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), h. 5.

²⁷ Margono, *op. cit.*, h. 20.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kelebihan ini dirasakan oleh pihak yang merasa akan mengalami diskriminasi apabila bersengketa di tempat kedudukan hukum pihak lawannya.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan sebelumnya tidak semuanya benar, sebab di negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Selain itu terdapat juga kelemahan dari proses arbitrase sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa perdata, khususnya mengenai perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase. Meskipun perkara yang ada berupa sengketa perdata, belum tentu juga dapat diselesaikan dengan arbitrase.
2. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, proses arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusinya.²⁸

²⁸ *Ibid.*, ps. 59.

3. Pelaksanaan arbitrase asing dapat terhambat akibat adanya asas nasionalitas dan asas resiprositas. Asas nasionalitas menyatakan bahwa untuk menentukan dan menilai apakah suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing, harus diuji menurut ketentuan hukum RI.

Menurut asas resiprositas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*). Putusan arbitrase asing yang diakui dan dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan negara RI dan terkait bersama dengan negara RI dalam suatu konvensi internasional.

Adanya asas nasionalitas dan resiprositas ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi sengketa yang diputus oleh arbitrase asing yang tidak memenuhi persyaratan kedua asas tersebut.

BAB IV

EKSISTENSI ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA.

A. Eksistensi Arbitrase sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi perkembangan proses yang dipakai dalam APS. Perkembangan APS kini telah mencapai berbagai bentuk mekanisme.

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (majelis arbiter) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.¹

¹ Priyatna Abdurrasyid, *op. cit.*, h. 56

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (yuridis), dan tanpa bantuan pihak ketiga (non yuridis). Jika menggunakan cara yuridis, maka bisa melalui pengadilan (litigasi), maupun di luar pengadilan (non litigasi) yang meliputi arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Sementara penyelesaian secara non yuridis bisa dilakukan dengan negosiasi, perundingan sepihak, maupun cara yang paling ekstrim seperti kekerasan.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Arbitrase sudah dikenal dan diakui keberadaannya di Indonesia sejak zaman pemerintahan Belanda. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat menggunakan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, baik sengketa yang sederhana maupun sengketa yang kompleks, dan peraturan-peraturan yang lahir untuk mengatur hal tersebut.

1. Landasan titik tolak arbitrase Pasal 377 HIR

Sebenarnya KUHPerdata yang berlaku untuk golongan bumiputera, baik HIR maupun Rbg, tidak mengatur tentang arbitrase. Hanya saja lewat Pasal 377

HIR dan pasal 705 Rbg ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputera.

Pasal 377 HIR dan pasal 705 Rbg menyatakan sebagai berikut :

Bilamana orang bumiputera dan timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa.

Dengan adanya Pasal 377 HIR dan pasal 705 Rbg ini, maka sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi golongan bumiputera untuk dapat menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara prosedural, sementara secara material, dasar hukum berlakunya pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

2. Landasan umum arbitrase pasal 615-651 RV

Dahulunya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat dalam KUHPerdato (*Reglement op de Bergelijke Rechtsvordering (RV)*) yang terdapat dalam S. 1847 – 52 *juncto* S. 1849 – 63. RV ini sebenarnya merupakan KUHPerdato yang berlaku untuk golongan Eropa. Sedangkan KUHPerdato yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan Rbg (untuk luar Jawa dan Madura). Akan tetapi, berdasarkan pasal 377 HIR dan pasal 705 Rbg maka ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputera.

Namun demikian, dengan berlakunya UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka keseluruhan ketentuan arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 81 UU No. 30 Tahun 1999:

“pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52)* dan pasal 377 *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 : 44*) dan Pasal 705 *Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtstreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227)*, dinyatakan tidak berlaku”.

3. Arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

Dengan keluarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Undang-undang ini mencabut ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, dan Pasal 377 HIR/ Pasal 705 Rbg.

Penyelesaian melalui arbitrase umumnya dipilih untuk sengketa kontraktual (baik yang bersifat sederhana maupun kompleks) yang dapat digolongkan menjadi :²

- a. *Quality Arbitration*, yang menyangkut permasalahan kontraktual (*quissionn of fact*) yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi.
- b. *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan

² Priyatna Abdurrasyid, “seba-serbi Tentang Arbitrase di Indonesia”, *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh BANI, Kadunda Tk. I Jawa Timur, (Surabaya : 1995), h. 15

dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.

- c. *Mixed Arbitration*, sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (*quistion of fact and law*).

Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Dengan perkara yang lebih sedikit, majelis hakim dapat mempertimbangkan setiap perkara secara lebih mendalam, sehingga akan didapati putusan hukum yang lebih bermutu dan memuaskan para pihak. Hal ini bisa mengurangi keinginan masyarakat untuk menggunakan upaya hukum, seperti kasasi, karena telah memperoleh kepuasan, walaupun dikalahkan.

Selain dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase, eksistensi arbitrase di Indonesia juga dapat dilihat dari banyaknya sengketa yang telah dan sedang diselesaikan melalui arbitrase, baik itu sengketa yang sederhana ataupun kompleks, diselesaikan melalui arbitrase institusional ataupun arbitrase ad-hoc, yang terjadi sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 30 Tahun 1999.

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Sebelum Lahirnya UU No. 30 Tahun 1999

Setelah kemerdekaan Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 1999, masyarakat Indonesia telah mengenal dan menjalankan bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, walaupun masih dalam bentuk yang paling sederhana. Tapi hal ini menunjukkan bahwa keberadaan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di Indonesia telah diakui

sejak lama. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 1999.

- 1) Penyelesaian sengketa hak ulayat (termasuk tanah ulayat) di desa Bone-Bone melalui arbitrase.

Di desa Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 1987 terjadi sengketa tanah ulayat antara penduduk transmigran asal Bali dari unit transmigrasi Sidobinangun dengan penduduk asli desa Bone-Bone. Akar permasalahannya adalah ketika 25 kepala keluarga transmigran asal Bali menggarap sawah mereka, yang ternyata di klaim oleh penduduk asli desa Bone-Bone sebagai tanah ulayat mereka. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui arbitrase, dan bertindak sebagai arbiternya adalah rapat koordinasi proyek transmigrasi Luwu.³

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Setelah Lahirnya UU No. 30 Tahun 1999

Memperhatikan bahwa perkembangan dunia usaha semakin pesat, dan rentan untuk timbul sengketa dalam pelaksanaannya. Dimana para pihak yang bersengketa kemudian banyak yang tertarik untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase, maka pemerintah Indonesia kemudian berinisiatif untuk menciptakan undang-undang yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang kemudian lahir dan dikenal dengan UU

³ Agnes M. Tohar, et, al., *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2; Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995). h. 155

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dibawah ini diuraikan beberapa contoh kasus yang diselesaikan melalui arbitrase setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 1999.

- 1) Penyelesaian Sengketa arbitrase antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan Pemerintah Indonesia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menggugat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke arbitrase internasional. Gugatan tersebut dilakukan karena Newmont dinilai gagal melaksanakan kewajiban divestasi saham 2006 dan 2007 sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya NNT dan Indonesia pada 2 Desember 1986.

Kesalahan Newmont yang paling fatal adalah Pasal 20, 21 dan 24 Kontrak Karya. Menurut pasal-pasal itu Newmont dinilai tidak melaksanakan divestasi saham sesuai waktunya, yaitu divestasi saham tiga persen pada 2006 dan tujuh persen pada 2007.⁴

Sengketa ini diselesaikan melalui Arbitrase Internasional dibawah prosedur arbitrase *United Nation Commission on Internatrional Trade Law* (UNCITRAL). Dimana penyelesaiannya dilakukan di Jakarta dengan dipimpin arbiter ketuanya Robert Primer asal Swiss.⁵ Pada 31 Maret 2009 dikeluarkan putusan akhir (final) yang memenangkan

⁴ http://www.tempointeraktif.com/pemerintah_gugat_Newmont_ke_arbitrase terakhir diakses tanggal 15 Maret 2011 pukul 01.06 WIB

⁵ <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2402-putusan-arbitrase-atas-sengketa-divestasi-saham-menangkan-Indonesia.html> terakhir diakses tanggal 15 Maret 2011 pukul 15.05 WIB

Pemerintah Indonesia, dan NNT harus segera menjalankan kewajiban divestasi. Saham yang didivestasi harus bebas dari gadai, dan sumber dana pembelian saham bukan menjadi tanggung jawab NNT.⁶

Dari contoh kasus yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa. Hal ini didukung dengan prinsip arbitrase itu sendiri, yaitu penyelesaian sengketa yang relatif murah dan efisien.

d. Kewenangan Arbitrase

Kewenangan arbitrase adalah sebagai juru pemisah persengketaan. Maksudnya, apakah persetujuan yang memuat perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk *pactum de compromittende* maupun akta kompromis mengesampingkan kompetensi pengadilan.

Terhadap permasalahan ini berkembang dua aliran sebagai berikut :

1. Klausal Arbitrase

- a. Suatu klausal arbitrase berkaitan dengan *niet van openbaar orde* (bukan ketertiban umum).
- b. Sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.
- c. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausul arbitrase.
- d. Dengan tidak adanya eksepsi yang diajukan pihak lawan dianggap telah “melepaskan” hak nya atas klausul arbitrase yang dimaksud.

⁶ “Pembelian Saham Newmont Tunggu SBY”, *Tribun Pekanbaru*, 4 April 2009, h. 4

- e. Eksepsi atau tangkisan klausul arbitrase baru diajukan dalam rekopensi. Tergugat telah melepaskan haknya atas klausul arbitrase dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunjuk pada yuridiksi pengadilan.

Dengan demikian pendapat tersebut bahwa arbitrase tidak bersifat absolut. Klausul tersebut harus dipertahankan para pihak sehingga akan tetap mengikat. Apabila sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase diajukan salah satu pihak ke pengadilan, pengadilan berwenang mengadili. Kewenangan baru gugur apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi akan adanya klausul arbitrase.⁷

2. Klausul Arbitrase

Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang megajarkan bahwa semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap persetujuan hanya dapat gugur (ditarik kembali) atas kesepakatan bersama para pihak.

Asas *pacta sun servanda* secara positif telah dituangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berintikan :

- a. Setiap perjanjian mengikat kepada para pihak ;
- b. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Bertitik tolak dari prinsip *pacta sun servanda*, aliran ini berpendapat bahwa setiap perjanjian yang memuat klausul arbitrase :

⁷ Suyud Margono, *ADR & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004) h. 126..

a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak; dan

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.

d. Tujuan arbitrase

Tujuan arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan atau bisnis dan industry dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat memperlambat penyelesaian perselisihan.⁸

Eksistensi arbitrase diakui di negara kita. Memang benar, pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal ini mengandung arti, demikian bunyi penjelasannya, bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Namun, penjelasan pasal itu juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar peradilan atas perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.⁹

⁸ H. Sudarto dan Zacni Asyhadie.*op cit* h. 33

⁹ Asikin Kusumah Atmadja, *Catatan pada putusan Mahkamah Agung, No. X 17 Mei Tahun 1988-1989*, h.22. dikutip dari buku Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Alumni, 1992). h. 3

B. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase

1. Putusan arbitrase (*Reglement of de Rechtsvordering*)

Pasal 631 RV meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,¹⁰ pasal tersebut diterjemahkan “para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan”.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang langsung berkaitan dengan bidang hukum yang disengketakan. Jika yang disengketakan mengenai masalah hubungan dagang, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah KUH Dagang.

Dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999, para pihak berhak memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya :

1. Penafsiran ketentuan yang kurang jelas.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cetakan kedua. (Jakarta : PT. Gramedia. 1989). h. 670. Pendapat ini dikutip dari buku Suyud Margono, *ADR & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004). h.130-131

2. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan keduabelah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi.¹¹ Putusan arbitrase yang tidak ditandatangani oleh seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

2. Sifat putusan Arbitrase

Persoalan mengenai kekuatan hukum daripada putusan arbitrase, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak. Seperti yang terdapat pada pasal 60 Undang-Undang arbitrase Dalam Pasal 60 tersebut dikatakan sebagai berikut :

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Sudargo Gautama, misalnya memberi komentar tentang putusan dari arbitrase adalah bersifat final “*Final and binding*”. Hal ini menurutnya, didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dan perjanjian ini mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Mengikat (*binding*) para pihak sebagai

¹¹ Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Final merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya banding atau kasasi terhadapnya.¹²

Asas-asas dimaksud sesuai dengan asas umum dalam ilmu hukum. Menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena putusan arbitrase bersifat final, dan menutup upaya banding atau kasasi, putusan tersebut sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung kekuatan eksekutorial.

3. Eksekusi Arbitrase

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.¹³

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Hal ini merupakan syarat dan jika tidak terpenuhi berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final artinya, putusan arbitrase

¹² Sudrjo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearifan Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

¹³ Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Sengketanya yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan ditetapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan

arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.¹⁴

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

Putusan arbitrase nasional itu, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Putusan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali meskipun para pihak telah menjanjikannya. Putusan majelis arbitrase yang final dan mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apa pun.

¹⁴ Takdir Rahmadi, Workshop “*Mediasi Prospek dan Tantangannya di Riau*”. Pekanbaru 12 Maret 2011.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Eksistensi arbitrase sebagai salah satu alternatif upaya penyelesaian sengketa sudah dikenal di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase, mulai dari RV, HIR, Rbg dan yang terakhir adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Selain dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur, eksistensi arbitrase juga dapat dilihat dari banyaknya sengketa yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan melalui arbitrase, baik itu sengketa yang sederhana maupun kompleks, baik melalui arbitrase nasional maupun internasional. Adanya beberapa lembaga arbitrase di Indonesia juga menjadi tolak ukur eksistensi arbitrase di Indonesia, seperti BANI (Badan Arbitrase Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).
2. Putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding* dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didukung oleh pemerintah yang telah mengatur mengenai dasar hukum dari pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Final dan *binding* artinya, putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai upaya hukum lebih lanjut,

apakah itu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Jadi, ketika putusan arbitrase telah diterima oleh masing-masing pihak, maka mereka harus dengan penuh kesadaran menerima dan melaksanakan putusan tersebut.

Pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase nasional telah diatur dalam pasal 59 – pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999. Terlebih dahulu putusan tersebut harus di daftarkan di panitera Pengadilan Negeri tempat putusan akan dilaksanakan, baru kemudian dapat dilakukan proses eksekusinya. Pada awalnya, eksekusi akan dilaksanakan dengan kesadaran masing-masing pihak. Namun jika ternyata tidak ada itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase, maka eksekusi akan dilakukan dengan cara paksa melalui campur tangan Pengadilan Negeri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diperlukan, antara lain :

1. Edukasi kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian diharapkan, kedepannya sengketa dalam dunia perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrasee, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan yang tentunya akan berpengaruh pada efektifitas penyelesaian perkara tersebut.
2. Pengadilan Negeri seharusnya menolak untuk memeriksa sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya, apabila sengketa tersebut jelas terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang megadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri baru berhak untuk memeriksa sengketa arbitrase apabila berdasarkan gugatan pihak yang dirugikan akibat pengambilan keputusan arbitrase yang berdasarkan itikad tidak baik, dan ditemukan ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pengambilan keputusan arbitrase tersebut.
3. Penegakan hukum oleh pemerintah terhadap proses pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding*. Pada prinsipnya, terhadap putusan arbitrase itu tidak ada upaya hukum lainnya. Hal ini harus dengan tegas dilaksanakan karena berkaitan erat dengan proses eksekusi putusan arbitrase. Apabila prinsip putusan yang final dan

binding ini telah benar-benar dilaksanakan, diharapkan proses pelaksanaan eksekusi putusannya akan berjalan dengan lancar. Hal ini akan menimbulkan kepastian hukum yang tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta: 2007

Abdurasyid, Priyatna., “seba-serbi Tentang Arbitrase di Indonesia”, *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh BANI, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya : 1995

-----., *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta : 2002.

-----., “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, 1:1, *PPH Newsleter Kajian Hukum Ekinomi dan Bisnis* No. 52 : 2003

Achmad Santosa., dalam Literatur yang berjudul *Pelembagaan ADR di Indonesia*. Makalah pada Kuliah Umum ADR, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya : 1999

Adolf, Huala., *Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002

-----., *Hukum Penyelesaian Senghta Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004

-----., *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005

Agnes M. Tohar, et, al., *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2; Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1995

Ali, Muhammad., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani Jakarta : 1999

Asikin Kusumah Atmadja., *Catatan pada putusan Mahkamah Agung, No. X 17 Mei Tahun 1988-1989*. h.22. dikutip dari buku Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni Bandung : 1992

Budiman, Budhy., *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan UU No. 30 Tahun 1999*, diakses dari situs www.uika-bogor.ac.id.htm, 11 februari 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta: 1990

Fuady, Munir., *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000

-----., *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003

Gunawan Widjaja dan Akhmad Yani., *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000

Harahap, M. Yahya., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cetakan kedua, PT. Gramedia, Jakarta : 1989

-----., 2001, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RVPerma No. 1 Tahun 1990)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997

http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia

<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/31/mengurangi-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional-basyarnas/>

<http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/06/27/brk.20030627-19.id.html>

http://www.tempointeraktif.com/pemerintah_gugat_Newmont_ke_arbitrase

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2402-putusan-arbitrase-atas-sengketa-divestasi-saham-menangkan-Indonesia.html>

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1989

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*)

Paustinus Siburian., *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta: 2004

Rachmadi Usman., *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta : 2002

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung : 2002

Rosjidi Ranggawidjaja., *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung : 1998

Setiawan., *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung : 1992

Simatupang., Richard Burton., *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta : 2007

Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta : 1985

Siomin, Soeharyo., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008

Subekti , R., *Arbitrase Perdagangan* Bandung : Bina Cipta, 1979

-----., *kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung : 1980

-----., *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung : 1990

Sudargo Gautama., *Arbitrase Dagang Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung: 1979

-----., *Aneka Hukum Arbitrase (kearah hukum arbitrase Indonesia yang baru)* 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996

Suyud Margono., *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Alumni, Bandung : 2000

-----., *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2004

Takdir Rahmadi., Workshop “Mediasi Prospek dan Tantangannya di Riau”. Pekanbaru 12 Maret 2011.

Tribun Pekanbaru, “*Pembelian Saham Newmont Tunggu SBY*”, , 4 April 2009

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004